

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Karakteristik Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin dikenal dengan Kota Seribu Sungai. Hal ini sesuai karena kondisinya memiliki banyak anak sungai yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari seperti MCK. Di samping itu sungai juga masih digunakan sebagai sarana transportasi selain jalur darat yang sudah ada.

Kota Banjarmasin berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m di bawah permukaan laut dengan kondisi daerah berpayapaya dan relatif datar. Secara geografis terletak antara 3°16'46'' sampai dengan 3°22'54'' lintang selatan dan 114°31'40'' sampai dengan 114°39'55'' bujur timur. Letak Kota Banjarmasin berada di sebelah selatan Provinsi Kalimantan Selatan, berbatasan dengan:

1. Di sebelah utara dengan Kabupaten Batola
2. Di sebelah timur dengan Kabupaten Banjar
3. Di sebelah barat dengan Kabupaten Batola
4. Di sebelah selatan dengan Kabupaten Banjar.

Kota Banjarmasin terletak dekat muara Sungai Barito dan dibelah dua oleh Sungai Martapura. Sehingga seolah-olah Kota Banjarmasin menjadi 2 bagian. Kemiringan tanah antara 0.13% dengan susunan geologi terutama bagian bawahnya didominasi oleh lempung dengan sisipan pasir halus dan endapan aluvium yang terdiri dari lempung hitam keabuan dan lunak. Luas Kota Banjarmasin 98,46 km

persegi atau 0,26% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin terdiri dari 5 kecamatan dengan 52 kelurahan.

Visi: "Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman (Bertakwa , Aman , Indah , Maju , Amanah dan Nyaman)"

Misi:

1. Mewujudkan Kota Banjarmasin bertaqwa dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, dengan mengedepankan pendidikan aBapak Khairudinlak dan budi pekerti sehingga terwujud masyarakat Banjarmasin yang religius, berbudi luhur, berbudaya, sehat dan sejahtera.
2. Mewujudkan Kota Banjarmasin yang aman, sehat, dan kondusif bagi pribadi dan kehidupan masyarakat.
3. Mewujudkan Kota Banjarmasin indah dengan penataan kota berbasis tata ruang berbasis sungai guna terwujud kota yang asri dan harmoni.
4. Mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan penguatan perekonomian melalui sektor perdagangan, perindustrian, dan pelabuhan dengan memperhatikan pemerataan pendapatan, meningkatkan taraf pendidikan, pengembangan dan pelestarian budaya banjar serta pariwisata sungai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
5. Melaksanakan pemerintahan amanah, ramah, bersih dan profesional berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta memaksimalkan fungsi melayani sebagai suatu tanggung jawab terhadap masyarakat dan Tuhan YME.
6. Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan dengan memperhatikan kesesuaian Tata Ruang, serta pembangunan

menyeluruh mulai dari daerah terluar, terpencil, dan terbelakang sebagai pembangunan dasar untuk menjadikan Kota Banjarmasin nyaman yang ditunjang dengan perbaikan pengelolaan wisata dan pengelolaan pasar tradisional secara profesional.¹

B. LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. Pendapat Ulama Tentang Peran Politik Perempuan di Kota Banjarmasin

Secara historis perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw telah memainkan peranan yang sangat strategis pada masa awal maupun pertumbuhan dan perkembangan Islam, baik dalam urusan domestik maupun publik. Ini dibuktikan antara lain melalui peran perempuan dalam membantu perjuangan Rasulullah Saw di medan perang, yaitu Khadijah adalah istri Nabi yang sangat setia yang telah menghibahkan banyak harta bendanya untuk perjuangan Islam.

Dalam perjalanannya perempuan tidak serta-merta mudah masuk dalam lingkup politik. Berbagai tantangan dan diskriminasi terjadi sehingga suara perempuan seolah terbungkam. Di era sekarang ini perempuan semakin menunjukkan eksistensinya dan mampu bersaing dengan laki-laki meskipun dalam porsi yang lebih sedikit. Sehubungan dengan peran politik perempuan tentu ada perbedaan pandangan di kalangan ulama. Berkaitan dengan

¹Bagian Umum Kota Banjarmasin, Misi Kota Banjarmasin, <https://umum.banjarmasinkota.go.id/2017/01/misi-kota-banjarmasin-2016-2021.html>, (2021).

permasalahan ini berikut penulis gambarkan bagaimana pendapat ulama di Kota Banjarmasin terhadap partisipasi perempuan dalam politik.

Responden pertama adalah Bapak Khairuddin. Beliau berusia 52 tahun. Bapak Khairudin merupakan tokoh yang terkenal di kalangan organisasi Muhammadiyah tidak hanya di Kota Banjarmasin namun dalam lingkup Provinsi Kalimantan Selatan. Gambaran singkat tentang profil pendidikan dan pekerjaan Bapak Khairudin, lebih lanjut beliau menceritakan bahwa ia dulu sekolah di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo pada jenjang sekolah menengah. Selanjutnya mengambil pendidikan S1 di Fakultas ushuludin jurusan tafsir hadis. Untuk S2 dan S3 mengambil jurusan Kajian Islam di Medan dan Jakarta.

Sehubungan dengan politik perempuan yang kian marak diikuti oleh perempuan penulis menanyakan pandangan beliau tentang eksistensi perempuan di kancah perpolitikan. Pandangan beliau tentang hal ini bahwa ini sifatnya sangat kontekstual. Di Indonesia kedudukan laki-laki dan perempuan itu setara. Dalam hal politik asalkan perempuan itu mempunyai kompetensi dan bisa diterima itu tidak masalah. Karena kultur masyarakat indonesia sudah biasa. Adapaun masalah perempuan jadi pemimpin yang paling puncak itu dipertimbangkan seperti presiden misalnya. Tapi kalo dia dipilih banyak orang dan melebihi dari yang lain dan bisa dipercaya tidak masalah. Tapi kalau sama saja lebih baik laki-laki saja.

Kaitannya dalam hal rumah tangga dan politik selama ada kesepakatan antara suami istri dan bisa menjalankan kewajiban itu tidak

masalah. Selama tugas dan kewajiban bisa terpenuhi maka tidak masalah. Pandangan beliau terhadap perbandingan masa sekarang dan zaman Rasulullah dan sahabat itu tergantung juga pada kultur masyarakatnya. Islam sendiri sangat menghargai perempuan dengan posisi perempuan sebagai pendidik anak-anak melahirkan generasi yang hebat bukan berarti menempatkan perempuan di ranah domestik saja.²

Responden kedua yaitu Bapak Tajuddin yang saat ini berusia 51 tahun. Bapak Tajuddin merupakan alumni fakultas syariah, fakultas hukum dan sampai magister hukum di UNLAM. Beliau sempat menjadi karyawan seperti pada umumnya selain itu beliau pernah menjadi guru agama dan kemudian kepala sekolah di PGA Muhammadiyah. Jabatan di pemerintahan yang pernah beliau jabat meliputi: ketua pengadilan agama di Barabai, kemudian diangkat ketua pengadilan agama di Banjarmasin dan juga diangkat sampai jadi hakim tinggi dan sampai pensiun. Beliau menjadi penasehat/ pembina sejak MUI sekitar tahun 2000an.

Kehadiran dipangung politik sama saja dengan laki-laki. Tidak masalah berkiprah di masyarakat dan jangan sampai melupakan kewajiban ia sebagai wanita, seperti menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu. Perempuan yang terjun harus bisa membagi tugas. Sejauh ini menurut pandangan beliau perempuan sudah bisa mengatur waktu dalam menjalankan kewajibannya. Namun sayangnya hanya sedikit yang berkecimpung di ranah

²Khairuddin, Rektor UMB sekaligus anggota MUI Kota Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 10 Oktober 2021.

politik atau di wilayah publik. Hal ini berhubungan pula dengan keterbatasan kemampuan perempuan dalam menjalankan tugasnya. Meskipun banyak sumber daya wanita, namun hanya sedikit yang mampu berdiri dalam pemerintahan bersaing dengan laki-laki. Lebih lanjut beliau memaparkan bahwa perempuan sangat perlu ada dalam dunia politik karena perempuan itu lebih teliti dibanding dengan laki-laki. Laki-laki kadang teledor dan tidak sabar dalam menjalankan keputusan. Di samping kelebihan, perempuan juga ada kelemahan perempuan yang lebih emosional sedangkan laki-laki lebih rasional. Jadi kehadiran perempuan sangat diperlukan di publik atau di masyarakat. Dalam hal politik ada bagian-bagian yang perempuan lebih kompeten dan mengerti dibanding laki-laki. Seperti urusan perempuan, anak yang dimana seorang perempuan lebih mengerti kebutuhan-kebutuhan mereka. Suara perempuan dapat terwakilkan dengan adanya perempuan lain yang mampu meyuarkan melalui panggung politik atau pejabat publik.

Dalam sejarah Islam pun menurut beliau banyak perempuan yang berjuang demi ummat. Bahkan mereka ikut berperang. Perempuan berani tampil. Beda halnya di zaman jahilliyah dimana perempuan dianggap lemah dan tidak mendapat ruang gerak untuk menyuarakan hak-haknya.

Khadijah menjadi perempuan muslim pertama yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya serta membenarkan risalahnya. Bahkan, ia penuh kerelaan ikut berpartisipasi dalam memikul beban dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada lagi perempuan dari suku Banu Najjar di Madinah, Nusaibah binti Kaab terkenal karena keberaniannya di medan perang. Bahkan,

namanya dikaitkan sebagai pejuang karena telah ikutserta di banyak pertempuran. Salah satu pertempuran terbesarnya, yaitu perang Uhud. Nusaibah binti Kaab menjadi salah satu tokoh perang yang memiliki tugas untuk mengawal dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi yang lainnya termasuk istri nabi Siti Aisyah juga merupakan sosok pejuang politik perempuan yang sangat pemberani.

Perempuan sudah ada dan hadir sejak zaman dahulu dalam politik, namun seiring perkembangan zaman perempuan sudah diberikan lebih banyak ruang, meskipun tidak sebanyak porsi laki-laki. Di Kota Banjarmasin sendiri sudah ada yang ikut bersaing dalam pemilihan walikota. Ini menunjukkan perempuan juga berkompeten dan layak menjadi pemimpin. Dan kembali lagi, sebagai perempuan muslimah tentu harus ingat kodratnya sebagai perempuan dan menjalankan kewajibannya. Kadang terlalu ambisi dan sibuk dengan politik malah mengabaikan kewajiban di dalam rumah tangganya.³

Responden ketiga yaitu Bapak Sarmiji Asri berusia 55 tahun. Beliau merupakan tokoh yang terkenal di kalangan NU. Selain itu beliau menjabat sebagai dosen di UIN Antasari Banjarmasin. Dan sisi lain dari beliau adalah sering mengisi program di Banjar TV yang berkaitan dengan kehidupan atau budaya sehari-hari masyarakat banjar dan dikaitkan dengan Islam. Bapak Sarmiji Aseri merupakan alumni dari IAIN Antasari atau sekarang sudah menjadi UIN Antasari Banjarmasin. Baik sarjana maupun Pasca Sarjana

³Tajuddin Anggota MUI Kota Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 11 Oktober 2021.

beliau mengambil di kampus tersebut. Beliau menjadi bagian MUI Kota Banjarmasin sejak tahun 2007 hingga sekarang dengan jabatan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI Kota Banjarmasin. Dalam hal organisasi keislaman beliau sangat aktif. Keikutsertaan beliau misalnya sebagai Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banjarmasin Wakil Rais Syuriah PCNU Kota Banjarmasin dan Anggota Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.

Berkaitan dengan permasalahan penelitian tentang perempuan di kancah perpolitikan beliau sangat setuju jika perempuan ikut politik. Karena dalam Islam tidak ada larangan untuk perempuan terjun ke politik apalagi untuk kemaslahatan bersama untuk kepentingan bersama dan umat pada umumnya. Untuk itu seorang perempuan tentunya harus kompeten. Ketika terjun ke politik mereka juga harus dibekali ilmu agama umum politik, pengetahuan dan sosial kemasyarakatan. Hal ini penting bagi perempuan agar dia mampu menyadari kodratnya sebagai perempuan juga penting bisa membagi peran dan tanggung jawabnya sebagai ibu, istri dan lain lain. Jangan sampai diabaikan salah satunya. Keduanya harus berjalan seimbang, dimana kehidupan pribadi dalam rumah tangga dan politik bisa berjalan dengan baik.⁴

Responden keempat yaitu Bapak Rusli, berusia 51 tahun dari organisasi NU. Bapak Rusli merupakan alumni IAIN Antasari atau sekarang menjadi UIN antasari Banjarmasin. Beliau dulu merupakan salah satu

⁴Sarmiji Asri, anggota MUI Kota Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 12 Oktober 2021.

anggota MUI Kota Banjarmasin dan sekarang menjabat sebagai ketua Komisi fatwa. Terhadap politik perempuan beliau berpandangan bahwa tidak masalah selama ia tidak mengindahkan kodratnya sebagai perempuan dan menjaga etika sebagai perempuan. Perempuan manapun bisa saja berpartisipasi selama ia pandai dalam manajemen waktu. Artinya kembali lagi kepada individu itu sendiri. Ada perempuan yang ketika terjun ke politik malah kewajiban rumah tangganya tidak terurus dengan baik. Anak kmenjadi kurang perhatian dan suami tidak terurus karena sibuk dalam politik. Hal ini tentu sangat tidak dianjurkan. Sebenarnya sama saja dengan laki-laki bagaimanapun semua memiliki kewajiban dalam kehidupan keluarga.

Menduduki jabatan itu bukan masalah jenis kelamin, tetapi bagaimana kesiapan, dan bakatnya. Tujuan dan kiprah pemimpin dalam etika Islam baik itu perempuan maupun laki-laki adalah perlindungan baik perlindungan hukum maupun perlindungan profesi. Perempuan sebagaimana anjuran untuk semua manusia supaya berperan penting dan strategis dalam “membina” keluarga dan masyarakat terutama dalam membimbing anak/pengikutnya kearah kedewasaan, kematangan dan kemandirian. Pemimpin menjadi sosok penuntun bagi keluarga dan masyarakat, selaras dengan kebijaksanaan pembangunan. Di samping itu jumlah penduduk perempuan di Indonesia lebih banyak dari laki-laki. Dengan jumlah perempuan yang demikian besar

maka potensi perempuan perlu lebih diberdayakan sebagai subyek maupun obyek pembangunan bangsa.⁵

Responden kelima yaitu Bapak Abdul Basir berusia 52 tahun dari Jamaah Tabligh Kota Banjarmasin. Beliau meraih gelar doktor di UIN Antasari tahun 2015. Selain menjadi anggota MUI Kota Banjarmasin, ia pernah menjadi sekretaris jurusan di UIN, menjabat di LP2M, Ketua Jurusan Tadris Kimia. Selanjutnya penulis menanyakan tentang permasalahan penelitian yang berkaitan dengan politik dan perempuan.

Secara umum Bapak Abdul Basir tidak keberatan jika perempuan ikut berpolitik. Tapi dari segi kemaslahatannya peran perempuan itu lebih baik berkiprah di rumah tangga untuk mendidik keluarga dalam rangka menyiapkan generasi ke depan untuk memimpin bangsa. Bukan berarti tidak sependapat tetapi kecenderungan beliau kalau ada laki-laki yang lebih kompeten lebih baik laki-laki. Misalnya menjadi presiden, gubernur, walikota atau bupati. Ini bukan berarti juga perempuan lemah tidak punya skill, atau tidak punya jiwa kepemimpinan. Bukan tetapi tanggung jawab perempuan dengan kelebihanannya hendaknya digunakan dalam mengelola rumah, memberi perhatian dan mendukung keluarga, mendidik dan memperhatikan tumbuh kembang anak.

Saat ini memang sudah mulai banyak perempuan yang berkiprah di politik seperti Bu Risma, Bu khofifah dan banyak lainnya. Keterlibatan dalam

⁵Rusli, anggota MUI Kota Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 14 Oktober 2021.

politik tentunya menuntut mereka pergi ke sana kemari tidak hanya di wilayah tempat mereka tinggal. Dari segi kemampuan mungkin saja mereka tidak kalah dengan pemimpin laki-laki lainnya. Namun kembali lagi pada pendapat pribadi bahwa alangkah baiknya jika memang urusan tersebut bisa dilaksanakan oleh laki-laki maka akan lebih baik.⁶

2. Faktor yang Mempengaruhi Alasan Pendapat Ulama Tentang Peran Politik Perempuan di Kota Banjarmasin

Responden pertama Bapak Khairuddin menilai bahwa peran politik perempuan adalah peluang atau kesempatan untuk kaum perempuan yang turut andil dalam ranah publik/ ikut serta dalam lembaga legislatif baik di partai politik maupun urusan-urusan kemasyarakatan. Peran perempuan di dalam dunia politik dan kebangsaan menjadi perhatian karena selama ini dunia perpolitikan dan publik menjadi dominasi kaum laki-laki.

Perempuan jika dilihat persinya sekarang sudah jauh meningkat. Hal ini tercantum pada pasal 65 Ayat 1 yang berbunyi: “Setiap partai politik beserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Dengan diberikannya ruang dan peluang tersebut maka diharapkan kaum perempuan yang berhasil duduk di parlemen dapat membuat dan menjunjung hak-hak perempuan yang selama ini kurang diperhatikan serta menyangkut

⁶Abdul Basir, Anggota Jama'ah Tabligh Kota Banjarmasin wawancara pribadi, Banjarmasin, 18 Oktober 2021.

pembahasan program dan produk hukum yang menyangkut hak dan kepentingan perempuan.⁷

Selanjutnya responden kedua Bapak Tajuddin memaparkan bahwa perempuan ditinjau dari ajaran Islam pada prinsipnya tidak jadi masalah dimana perempuan menjadi pejabat dan pemimpin publik. Perempuan boleh jadi presiden, gubernur, bupati, walikota, camat dan jabatan-jabatan lain. Yang tidak boleh itu kalo jadi pemimpin dalam keluarga. Sehebat apapun perempuan ketika di keluarga yang menjadi pemimpin adalah laki-laki dalam hal jadi suaminya. Sehebat apapun kaum perempuan jika didalam anggota keluarganya lebih pantas untuk menjadi seorang pemimpin adalah kaum laki-laki dalam hal menjadi suaminya.

Berdemokrasi telah dibuka oleh pemerintah yaitu salah satunya melalui Undang-undang. Undang-undang adalah salah satu kekuatan bagi kaum perempuan agar dapat berperan lebih dan terlibat dalam pengambilan keputusan dan kaum perempuan harus membawa program-program yang di gulirnya misalnya pada pemilu legislatif lalu pimpinan daerah mendorong kader-kadernya yang berbakat dan berminat di dalam ranah politik untuk berkiprah di lembaga legislatif, dengan cara melakukan program calon pemilih perempuan dan pemilih pemula, menyelenggarakan seminar-seminar dan diskusi tentang politik, bekerjasama dengan berbagai politik dalam rangka mensukseskan legislatif.

⁷Khairuddin, Rektor UMB sekaligus anggota MUI Kota Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 10 Oktober 2021.

Kemudian beliau lebih lanjut menegaskan bahwa urusan didalam dapur jangan di jadikan sebuah penghalang untuk berkiprah didalam ruang publik bagi perempuan. Perempuan, yang berkiprah di ruang publik misalnya menjadi kepala daerah, anggota dewan secara tidak langsung perempuan tersebut memberikan tauladan yang baik dalam keluarga sehingga menjadi contoh untuk anak-anaknya. Beliau beranggapan bahwa dengan adanya peran perempuan di ruang publik juga bertujuan untuk mengangkat derajat dan martabat keluarga.⁸

Selanjutnya **responden ketiga** yaitu Bapak sarmiji Asri memaparkan bahwa peran politik perempuan secara tidak langsung peran perempuan di bidang sosial yang sangat cukup besar dalam berkontribusi memecahkan permasalahan di masyarakat. Peranan perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di ruang publik adalah sebuah harapan agar lahir kebijakan yang sensitif terkait dengan gender sehingga hasil dari kebijakan tersebut benar-benar dapat dirasakan secara adil kepada masyarakat. Laki-laki dan perempuan bukan lawan namun patner dalam mengatur kehidupan.

Pada Undang-Undang Dasar 1945, bahwa perempuan memiliki peran dan posisi penting dalam pembangunan suatu bangsa negara. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 UUD 1945, bahwa kedudukan perempuan sederajat dengan laki-laki di bidang hukum dan pemerintahan. Dengan demikian, bahwa perempuan dalam hal ini mempunyai kedudukan yang sama

⁸Tajuddin Anggota MUI Kota Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 11 Oktober 2021.

dengan laki-laki, memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Lebih lanjut, peran perempuan dalam politik dan pemerintahan sudah dijamin oleh konstitusi di Indonesia. Sehubungan dengan tuntutan atas adanya keterlibatan perempuan dalam pembangunan telah menjadi sebuah konsekuensi yang logis dan relevan, dengan maksud untuk mewujudkan kehidupan negara yang partisipatoris. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin setiap warga negaranya berperan aktif dalam pembangunan.⁹

Responden keempat Bapak Rusli memeparkan bahwa ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting. Beberapa diantaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking, dan pengelolaan waktu. Selain itu, perlu diakui kenyataan bahwa perempuan sudah terbiasa menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok- kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di Alasan tersebut di atas tidak hanya ideal sebagai wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Argumen tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan publik dan relevan untuk memiliki keterwakilan dalam jumlah yang signifikan dalam

⁹Sarmiji Asri, anggota MUI Kota Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 12 Oktober 2021.

memperjuangkan isu-isu kebijakan publik dalam proses kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Selain itu pula, keikutsertaan perempuan bagian dari sebagai pengambil keputusan politik juga dapat mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi secara berkelanjutan dalam masyarakat. Kepedulian pada kepentingan perempuan itu dapat diakomodasi secara optimal dan baik apabila perempuan tampil dan memiliki peran dalam pembuatan atau pengambilan kebijakan.¹⁰

Responden kelima Bapak Abdul Basir mengungkapkan Kaum feminisme liberal menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum pria, sehingga segala kebijakan yang ada akan didominasi oleh pengaruh yang sangat kuat dari para kaum pria tadi, sehingga seolah-olah negara itu bersifat “maskulin”, sedangkan wanita hanya ada “diam” dalam negara tersebut, hanya sebagai warga negara, bukan sebagai orang-orang yang berpengaruh dalam pemerintahan, bukan sebagai pembuat kebijakan. Lambat laun wanita semakin aktif berpolitik bahkan bisa saja tanpa takut kehidupan rumah tangga bukan menjadi skala prioritas. Wanita sibuk di luar jarang ada di rumah karena urusan politik. Dampaknya perkembangan anak yang harusnya dalam perhatian orang tua tidak terkontrol dengan baik. Bisa saja anak menjadi nakal karena kurang kasih sayang. Mencari perhatian dengan membuat masalah.

¹⁰Rusli, anggota MUI Kota Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 14 Oktober 2021.

Akan tetapi bukan berarti beliau menolak 100 persen. Jika memang ada perempuan yang hebat seperti perempuan di zaman Rasulullah bisa saja. Hanya saja di zaman sekarang sulit untuk menemukan perempuan seperti itu. Di samping itu situasinya juga berbeda. Sangat disayangkan kalau perempuan sibuk mengurus permasalahan publik yang bisa saja dilakukan laki-laki sedangkan permasalahan dalam keluarganya sendiri tidak terurus dengan baik.¹¹

3. Landasan Berpikir Narasumber tentang Peran Politik Perempuan di Kota Banjarmasin

Responden pertama Bapak Khairuddin menyatakan bahwa *Al ummu madrasatul kubro*. Jadi kembali disesuaikan dengan kultur kembali. Di Arab perempuan diam di rumah karena memang mereka disiapkan segala kebutuhan perempuan atau istri di rumah. Diberikan fasilitas dan rumah yang bagus. Beda halnya dengan kultur di Indonesia dimana perempuan ikut mencari nafkah saling bahu-membahu dengan suami.

Perempuan harus ikut peran dalam politik karena Perempuan itu banyak jumlahnya. Perempuan menempati posisi yang sangat sentral untuk generasi ke depan. Persoalan-persoalan mereka itu harus diberikan haknya. Jangan sampai perempuan hanya dijadikan sumber suara untuk pemilihan. Kemudian pandangan beliau tentang perempuan dalam perpolitikan di Kota Banjarmasin. Semua tergantung perempuan yang mana. Apakah ia kompeten

¹¹Abdul Basir, Anggota Jama'ah Tabligh Kota Banjarmasin wawancara pribadi, Banjarmasin, 18 Oktober 2021.

atau hanya punya uang, karena dengan model yangg sekarang ada kemungkinan mereka hanya duduk dan tidak bisa menyuarakan. Intinya perempuan yang ingin terjun ke politik harus mempersiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin agar bisa menempatkan perannya dalam dunia politik.

Adapun hadits yang di riwayatkan kepada Al-Bukhari menjelaskan bahwa kaum perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin, Tidak akan menjadi menang bagi kaum perempuan yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Hadits ini berkesan menyudutkan kaum perempuan untuk menjadi pemimpin menurutnya haruslah dipahami secara lebih mendalam tentang latar belakang dari hadits tersebut. Lantas bolehkah perempuan menjadi kepala negara dan masuk ke ranah politik? Menurut beliau dalam keputusan tidak secara jelas tegas mengatakan bahwa kebolehan perempuan menjadi kepala negara dan masuk ke ranah politik semangat dari seluruh keputusan tersebut tidak melarang perempuan menjadi kepala negara.¹²

Responden kedua yaitu Bapak Bapak Tajuddin. Sebagaimana responden pertama, beliau tidak menentang jika perempuan terlibat dalam politik. Jika ada yang menjadikan dasar *árrijalu qowwamuna 'alannisa* sebagai alasan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dalam segala hal dan di bawah laki-laki maka rasanya kurang tepat. Ini harus dipahai secara

¹²Khairuddin, Rektor UMB sekaligus anggota MUI Kota Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 10 Oktober 2021.

mendalam. Banyak ayat atau hadis yang harus dipahami secara mendalam. Tidak bisa secara tekstual saja.

Al-Quran menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar dengan kaum laki-laki. Kalaupun ada perbedaan, sebagai konsekuensi fungsi dan tugas utama yang dibebankan Islam adalah untuk saling melengkapi dan tolong menolong dan supaya bantu membantu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al – Hujurat (49) ayat 13, *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.* Dalam masalah ini tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, bangsa. Untuk menentukan Posisi Strategi, posisi kunci di pemerintah, dan partisipasi dalam segala bidang, yang dilihat adalah derajat ketaqwaan.¹³

Responden ketiga yaitu Bapak Sarmiji Asri, sehubungan dengan ayat yang menyatakan *ar rijalu qowwamuna ‘alannisa* bukan berarti derajat laki-laki lebih tinggi dan mngerdilkan posisi perempuan. Dalam hal ini tetap memberikan ruang kepada perempuan yang cerdas agar mampu berkembang termasuk dalm politik. Berbeda halnya pada zaman jahiliyah dimana perempuan direndahkan martabatnya dan tidak mempunyai kebebasan seperti

¹³Tajuddin Anggota MUI Kota Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 11 Oktober 2021.

saat kedatangan rasulullah hingga sekarang. Siapapun orangnya saat ini kita tidak boleh mengkotak-kotakkan karena gender. Selama ia mampu menjadi sosok yang membawa perubahan terhadap hak-hak perempuan, maka penting sekali andil perempuan dalam dunia perpolitikan. Mengenai ayat atau dalil yang berkaitan dengan politik perempuan beliau menyatakan kurang ingat detailnya. Yang jelas ayat tersebut berbunyi *man amila sholehan min dzakar in aw untsa*, dan seterusnya. Atau juga surah al Hujurat ayat beliau mengenai perempuan terjun ke politik pada masa rasulullah maupun sahabat dan masa sekarang itu sah-sah saja. Pada zaman dahulu banyak kaum perempuan terjun ke politik demi memperjuangkan kebenaran. Istri nabi sendiri yaitu Siti Aisyah ikut berperang berpolitik demi menegakkan keadilan. Selain itu ada Asma binti Abu Bakar itu juga terkenal. Apalagi pada masa sesudahnya banyak sekali tokoh perempuan yang dikenal berperan berjuang dalam politik. Hingga sekarang makin banyak perempuan yang menempati posisi penting di pemerintahan. Karena dulu banyak ekali hal yang membatasi peran perempuan untuk bisa bersaing dan ikut andil dalam kancan politik. Pandangan beliau terhadap politik perempuan Bapak Khairudinususnya Kota Banjarmasin untuk saat ini tidak bisa dikatakan positif atau negatif. Namun diharapkan kehadirannya mampu mewakili perempuan dalam memperoleh hak-haknya. Suara perempuan sangat perlu dalam upayanya membentuk karakter anak bangsa. Sikap lemah lembut dan kasih sayang perempuan merupakan bagian lain dari politik agar ada penyeimbang. Perempuan merupakan sosok yang suaranya harus didengar.

Dalam keadaan zaman yang semakin runyam khususnya generasi muda. Maka suara perempuan dapat mewakili keinginan adanya perubahan generasi muda yang cerah bebas narkoba. Di tangan perempuan anak-anak dididik dengan sepenuhnya. Perempuan mengerti kebutuhan-kebutuhan anak di masa perkembangannya. Jadi, di masa apapun kehadiran perempuan sangat pentingnya dalam dunia politik.¹⁴

Responden keempat Bapak Rusli Perempuan berhak menuntut ilmu sebagaimana laki-laki. Dalam hadis disebutkan: Menuntut Ilmu itu suatu kewajiban kepada setiap muslim (baik laki-laki dan perempuan). Selain itu Aisyah RA pernah memuji para perempuan Anshar yang giat belajar agama. “Perempuan terbaik adalah mereka yang dari Anshar, mereka tidak pernah malu untuk selalu belajar agama” ini ada dalam hadis. Dari sisi menyuarakan pendapat suatu ketika saat Sayyidina Umar membatasi mahar maka tiba-tiba seorang wanita memprotes. Kemudian waktu Perang Uhud atau Bapak Khairudinandak kalau tidak salah. Bibi Rasulullah luar biasa berani. Pada zaman peperangan peran perempuan luar biasa, seperti membantu menyiapkan makanan, mengobati korban perang. Dan banyak lagi perempuan lainnya yang berani maju membela agama.

Politik itu bagian dari agama. Jika ada yang mengatakan bahwa bukan bagian dari agama, maka itu salah persepsi. Jadi dimanapun lini yang bisa dimasuki dan dikerjakan perempuan itu tidak dilarang. Selama tidak

¹⁴Sarmiji Asri, anggota MUI Kota Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 12 Oktober 2021.

melanggar hukum-hukum yang sudah ditentukan dalam syariat. Untuk politik di Banjarmasin, sepanjang beliau lihat sangat positif. Perempuan dapat mengambil hal-hal yang tidak tersentuh oleh laki-laki. Dan kembali lagi dengan catatan bahwa perempuan itu memang berkompeten dalam bidangnya.¹⁵

Responden kelima Alasannya perempuan itu adalah ibu bagi keluarga. Peran ibu lebih utama daripada peran di luar rumah. Kalau berkakir di luar rumah tetapi terbengkalai pendidikan anak dan terbengkalai pelayanan terhadap suami kurang terurus maka itu kurang baik. Sehingga dia akan susah bagaimana cara membagi waktu antara kepentingan umum dan rumah tangga. Beda halnya dengan laki-laki. Ia penanggung jawab secara umum. Maka ia dijadikan Allah untuk menjadi pemimpin bagi semuanya dan keluarganya juga. Sehingga beliau berpendapat kecenderungannya lebih suka kepada laki-laki untuk menjadi pemimpin publik.

Perempuan agak susah berperan dalam politik. Dalam konsep pendidikan keluarga, ibu itu madrasah bagi anak-anaknya yang pertama dan utama dalam rumah tangganya. Kalau ia tidak bisa melakukan itu, maka ia dapat meninggalkan suatu kewajiban yang sangat penting. Sebagai contoh dalam sebuah kelas maka dalam kelas itu ada ada gurunya gurunya itu sama dengan ibu. Kalau dalam sekolah gurunya tidak ada maka kacau jadinya. Seperti ribut pertengkaran. Kalau gurunya ada maka kelas terkontrol. Sama

¹⁵Rusli, anggota MUI Kota Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 14 Oktober 2021.

halnya dengan dalam kehidupan rumah tangga, manakala ibu ada di rumah dan berperan seorang guru bagi keluarganya mampu mendidik dan memberi perhatian bagi anak maka ia akan mampu menjadikan anak-anaknya berhasil. Sebaliknya manakala ibu aktif dan sibuk di luar menitipkan anak di luar atau diserahkan kepada orang lain mendidiknya tidak sama karena ibu memiliki hubungan yang sangat erat dengan anak-anak. Maka lebih utama peran perempuan itu ada di rumah mendidik anak-anak. Kalau perempuan memiliki bakat untuk memimpin maka ia bisa didikkan kepada anaknya yang laki-laki yang bisa saja nanti ia bisa menjadi pemimpin yang besar di masa kan datang. Kalau perempuan yang jadi pemimpin, nanti banyak hal-hal yang tidak bisa dikerjakan apalagi memimpin bangsa yang mayoritas beragama Islam. Umpamanya ada acara PHBI di mesjid, sementara beliau sedang haid maka akan susah. Kemudian ketika salat maka ia akan sulit memimpin. Belum lagi muncul hal lain seperti kecurigaan, kecemburuan dari pasangan. Perempuan bertemu dengan banyak laki-laki walaupun dalam kegiatan rapat, kegiatan karena tugas. Hal ini bisa berdampak pada kehidupan rumah tangga. Dampak lainnya adalah terhadap anak. Ketika anak membutuhkan ibu sedangkan ia harus menjalankan kewajibannya melayani publik. Meskipun banyak cara untuk mengatasi namun ada hal-hal yang terbengkalai.

Untuk saat ini agak susah mencari perempuan yang benar-benar sholehah yang menjaga kehormatan diri terjun ke politik. Nanti banyak pergaulannya yang sulit terkontrol. Ada masa ia harus berangkat ke berbagai tempat. Nanti ia meninggalkan suami dan anaknya. Meskipun ia bisa menjaga

diri tetapi dia tidak akan mampu untuk tidak bergaul dengan laki-laki. Kemudian dia vocal menyampaikan kebenaran, maka ia juga akan terhambat terhadap kewajiban utamanya di rumahnya. Menurut beliau lebih banyak negatifnya jika berpartisipasi ke politik. Wanita tidak begitu agak bebas. Sedikit saja kesalahan maka dampaknya luar biasa. Bisa hancur rumah tangga dan ini banyak kejadian yang terjadi. Demi kepentingan politik, partai, kekuasaan dan jabatan rumah tangga dikorbankan. Meskipun ada pendapat yang berbeda, namun beliau kembali lagi menekankan bahwa lebih banyak mudharatnya.¹⁶

C. ANALISIS HASIL PENELITIAN

Secara historis, telah terjadi perlakuan yang tidak seimbang, yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sejarah peradaban manusia banyak didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga laki-laki mendominasi semua peran di masyarakat sepanjang sejarah, kecuali dalam masyarakat yang matriarkal yang jumlahnya sangat sedikit. Jadi, sejak awal sudah terjadi ketidaksetaraan gender yang menempatkan perempuan pada wilayah yang marginal. Peran-peran yang dimainkan kaum perempuan hanyalah peran-peran di sekitar rumah tangga. Sementara itu, kaum laki-laki dapat menguasai semua peran penting di tengah-tengah masyarakat. Dari sini muncullah doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan

¹⁶Abdul Basir, Anggota Jama'ah Tabligh Kota Banjarmasin wawancara pribadi, Banjarmasin, 18 Oktober 2021.

dianggap tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan seperti yang dimiliki laki-laki dan karenanya perempuan tidak setara dengan laki-laki. Laki-laki harus memiliki dan mendominasi perempuan.

Data jumlah penduduk Indonesia berdasarkan BPS tahun 2020 adalah 270 203,9 juta. Dimana jumlah tersebut terdiri dari 136 661,9 juta perempuan, dan 133 542,0 juta laki-laki. Atau dalam presentase 50,58 persen untuk laki-laki dari keseluruhan penduduk Indonesia. Sedangkan perempuan sekitar 49,42 persen. Dilihat data ini sebenarnya proporsi laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda namun dalam hal politik proporsi perempuan dalam partisipasi politik jauh di bawah laki-laki, meskipun mengalami peningkatan signifikan jika dibanding di era-era sebelumnya.

Pada pemaparan tentang hasil penelitian dari 5 orang responden baik dari organisasi NU, Muhammadiyah dan Jama'ah Tabligh Kota Banjarmasin didapatkan informasi bahwa sebagian besar setuju bahwa tidak ada masalah bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam politik. 4 orang dari kalangan NU, dan Muhammadiyah menganggap tidak akan ada masalah perempuan menjadi bagian dari politik sebagaimana halnya yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Namun satu orang dari jamaah Tabligh tidak setuju jika perempuan ikut campur dalam urusan politik. Artinya 80 persen dari responden setuju jika perempuan terjun dalam politik.

Perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa dan sering terjadi. Setiap pendapat terdapat alasan atau latar belakang yang mendasarinya. Mengenai pendapat ulama di Kota Banjarmasin yang tidak mempermasalahkan perempuan

ikut berpolitik beralasan bahwa selama perempuan itu berkompeten dan bisa menyuarakan kemaslahatan orang banyak maka tidak akan menjadi masalah. Di samping itu perempuan juga bisa membagi waktunya dan menjalankan kodratnya sebagai perempuan misal sebagai istri dan ibu maka tidak ada masalah bagi mereka. Saat ini banyak perempuan yang hebat dan kompeten sebagaimana laki-laki yang bisa menjadi seorang pemimpin.

Melihat pendapat di atas juga sejalan dengan pada masa Rasulullah SAW. Dimana pada masa itu perempuan juga turut andil berjuang. Pada masa Nabi Muhammad SAW kaum perempuan sudah memainkan peran-peran politis dalam rangka menegakkan kalimat-kalimat Allah, seperti melakukan dakwah Islam, ikut berhijrah bersama Nabi, bai'at kepada Nabi Saw., dan melakukan jihad atau ikut serta dalam peperangan bersama-sama kaum laki-laki. Semua hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. mengikutsertakan perempuan di dalamnya. Dalam berbagai peristiwa hijrah, perempuan memainkan peran yang cukup penting. Kaum perempuan juga melakukan bai'at bersama kaum laki-laki di hadapan Nabi. Kaum perempuan juga terlibat aktif dalam kegiatan dakwah Islam sehingga banyak perempuan kafir Quraisy yang kemudian menjadi Muslimah karena ajakan mereka. Begitu juga dalam hal jihad atau peperangan, sebagian besarnya menyertakan perempuan di dalamnya. Meskipun peran mereka sebagai pendukung atau pendamping, tetapi peran mereka sangat penting dan menanggung resiko yang sama seperti halnya laki-laki.

Islam tidak meyakini satu jenis hak, satu jenis kewajiban, dan satu jenis hukuman bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam segala hal. Islam

memandang satu perangkat hak dan kewajiban serta hukuman lebih cocok bagi laki-laki dan satu perangkat lainnya lebih sesuai bagi perempuan. Sebagai hasilnya, dalam beberapa hal Islam mengambil sikap sama sehubungan dengan perempuan dan laki-laki, dan dalam hal-hal lain Islam mengambil sikap yang berbeda-beda. Prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Keadilan yang diberikan Islam berupa kesetaraan dan kesederajatan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi, Islam tidak memandang identik atau persis sama antara hak-hak laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah menganut preferensi dan diskriminasi yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Islam juga menggariskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak persis sama atau identik. Kata “kesetaraan” (equality) telah memperoleh semacam kesucian, karena kata-kata ini telah mencakup pengertian keadilan dan tidak adanya diskriminasi. Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Ali ‘Imran (3): 19) sangat peduli terhadap kesejahteraan kaum perempuan, menghargai sifat mereka, dan menghormati mereka.

Menelaah faktor yang mempengaruhi pendapat para ulama, pandangan penulis lebih kepada pendapat atau pemahaman para ulama di Kota Banjarmasin pada masalah perempuan dan politik. Melihat dari organisasi keagamaan yang berbeda namun cenderung sama pendapat seperti responden dari kalangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Pendapat berbeda dari responden Jamaah Tabligh. Namun beliau menekankan bahwa ini adalah pendapat pribadi

responden karena pandangan beliau bertujuan agar perempuan bisa menjadi perempuan yang bisa menjaga martabatnya dengan menghindari terjunnya perempuan ke politik karena di sana banyak godaan. Di samping itu tanggung jawab di rumah tangga lebih penting. Jika melihat faktor usia rata-rata responden berada di rentang usia yang kurang lebih sama. Dan itu tidak menjadi faktor yang mempengaruhi pendapat para responden. Penulis menelaah bahwa faktor lainnya adalah berhubungan dengan pola pikir terhadap perempuan dan politik. Mereka yang setuju juga mengagumi sosok perempuan yang berhasil dalam perjuangan terhadap kemaslahatan seperti sosok istri rasulullah dan sosok di zaman sekarang dengan adanya perempuan-perempuan yang berhasil menjadi pemimpin seperti presiden menteri, walikota dan jabatan pemerintahan lainnya. Pendapat yang kurang setuju, menurut penulis lebih kepada upaya konservatif agar perempuan tidak terlena dalam pergelutan politik dan pada akhirnya mengabaikan tugas utamanya sebagai perempuan. Bukan berarti sama sekali tidak boleh, namun sangat sulit mencari perempuan sholehah yang mampu mengimbangi perannya di kehidupan keluarga dan politik di era saat ini. Jika aktor pendidikan, menurut penulis tidak berpengaruh karena rata-rata responden menempuh pendidikan di kampus yang menganut pola pikir modernis.

Alasan-alasan yang diungkapkan oleh para responden pada umumnya sama. Sebagian besar mereka membolehkan perempuan berpartisipasi dalam politik. Tidak ada batasan-batasan yang melarang selama perempuan tersebut berkompeten dan mampu memperjuangkan kemaslahatan orang banyak. Hal penting juga seorang perempuan itu harus menjaga identitasnya sebagai

muslimah seperti istri Nabi yang memimpin usaha perdagangan, kemudian kepemimpinan di wilayah publik. Bagi perempuan tidak dipermasalahkan menjadi pemimpin dengan syarat peran tersebut dapat dijalankan dengan baik, memiliki potensi dalam memenuhi syarat sebagai pemimpin, dan tidak menyebabkan mudharat atas dirinya, keluarga, dan masyarakat. Ayat yang menyatakan *ar rijalu qowwamuna 'alannisa* sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa responden bukan berarti derajat laki-laki lebih tinggi dan mengerdikan posisi perempuan. Dalam hal ini tetap memberikan ruang kepada perempuan yang cerdas agar mampu berkembang termasuk dalam politik. Dapat dipahami juga laki-laki adalah pemimpin ada benarnya khususnya dalam lingkup tertentu seperti dalam kehidupan rumah tangga, seperti ibadah shalat. Namun dalam ranah politik selama perempuan bisa dan memiliki kapasitas maka tidak menjadi masalah.

Suara perempuan dapat menyuarakan suara perempuan lainnya. Kehadiran perempuan bisa mengisi bagian yang bisa saja kurang tepat jika dijallankan oleh perempuan. Hal ini senada pula dengan apa yang dinyatakan oleh M. Quraish Shihab bahwa tidak ada batas yang membatasi kaum perempuan untuk berada dalam posisi pemimpin negara. Pendapat tersebut tertulis dalam bukunya yang berjudul: “Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru”.

Menyatakan:

Harus diakui bahwa memang ulama dan pemikir masa lalu tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala negara, tetapi hal ini lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap untuk menduduki jabatan, jangankan

kepala negara, menteri, atau kepala daerah pun tidak. Perubahan fatwa dan pandangan pastilah terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi, dan karena itu tidak relevan lagi melarang perempuan terlibat dalam politik praktis atau memimpin negara.¹⁷

Sedangkan pendapat satu responden lain yaitu Abdul Basir dari kelompok Jamah Tabligh sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh as-Siba'i yang mana ia berpendapat bahwa peran utama perempuan adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Pada diri perempuan, Allah menciptakan kemampuan reproduksi dan fungsi penentu keberlangsungan jenis manusia. Oleh sebab itu, tidaklah tepat jika perempuan harus ikut berperan dalam kegiatan politik. Sebagaimana yang sudah tersurat dari surat an-Nisa ayat 34 yang diambil dari kalimat pertama yaitu *qawwamun*. Mustafa as-Siba'i mengatakan, bahwa pemahaman ini betul adanya karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Oleh sebab itu, perempuan harus tetap di belakang laki-laki dalam situasi dan kondisi apapun.¹⁸ Pada responden dari kalangan Jamaah Tabligh ia berpandangan perempuan bisa mendidik anak untuk menjadi pemimpin besar dikemudian hari tanpa harus perempuan menjadi pemimpin. Karena sebagaimana hadis yang berbunyi *Al-ummu madrasatul ula, iza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal a'raq.* "Ibu adalah sekolah utama, bila engkau mempersiapkannya, maka engkau telah mempersiapkan generasi terbaik. Dalam konteks inilah Rasulullah menyerukan kepada keluarga Bapak Khairudinususnya para Ibu

¹⁷M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 350.

¹⁸Mustafa as-Siba'i, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadajah Nasution cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 135.

untuk menjadi sekolah bagi anak-anaknya. Dengan demikian jika perempuan terlalu berkecimpung di dunia politik yang banyak mengorbankan waktu, maka apa yang disampaikan di dalam hadis tersebut tidak bisa terpenuhi secara maksimal. Keberadaan perempuan dilingkup politik lebih banyak mendatangkan mudharat dibandingkan manfaatnya.

Di samping itu pendapat dari responden ini sangat sesuai dengan pernyataan Abdul Ghaffar Hassan dalam bukunya *the Right & Duties of women in Islam* dimana ia menyatakan bahwa:

- a. The woman' s natural and primary career is her home, family and children. This is in itself an extremely demanding role; and in order for her to do justice to her role in parliament, she would have to deny her own maternal instincts and sacrifice the needs of her family. This is an unacceptable injustice to her.
- b. Full participation in parliamentary proceedings involves long hours in an atmosphere of free mixing and social interaction. This is completely forbidden in Islam.
- c. A woman is obliged to observe Islamic injunctions on Satr and Hyj̄b. Spending entire days and nights in parliament wearing Hij̄b is difficult and uncomfortable, and the practical example of women parliamentarians in Muslim countries today is that they cannot obey the rules. The nature of the job is that it suits men only, and women who try to take on a man's work will inevitably find themselves out of their depth.
- d. A woman cannot travel on a journey which lasts more than a day and night unless she is accompanied by a Mahram (a close male relative). Islam recognizes that society can be very dangerous, and so does its utmost to protect women. Members of parliament do not only attend daily sessions but are required to travel inland and abroad in order to better discharge their duties. It will be impractical for the Muslim woman to look constantly for a Mahram. All this does not mean to say that women have no say in the government of their country. If a woman has the capability and knowledge, which could benefit the state, she can advise the government without having to participate in its daily workings.¹⁹

Artinya:

¹⁹Abdul Ghaffar Hassan, *the Right & Duties of women in Islam* (Riyadh: Darussalam, 1996), p. 20-24.

- a. Karir alami dan utama wanita adalah rumah, keluarga, dan anak-anaknya. Ini sendiri merupakan peran yang sangat menuntut; dan agar dia melakukan keadilan untuk perannya di parlemen, dia harus menyangkal naluri keibuannya sendiri dan mengorbankan kebutuhan keluarganya. Ini adalah ketidakadilan yang tidak dapat diterima baginya.
- b. Partisipasi penuh dalam proses parlementer melibatkan waktu berjam-jam dalam suasana pergaulan bebas dan interaksi sosial. Ini sepenuhnya dilarang dalam Islam.
- c. Seorang wanita wajib menjalankan perintah Islam tentang Satr dan Hyib. Menghabiskan sepanjang hari dan malam di parlemen dengan mengenakan hijab itu sulit dan tidak nyaman, dan contoh praktis anggota parlemen perempuan di negara-negara Muslim saat ini adalah mereka tidak dapat mematuhi aturan. Sifat pekerjaan itu hanya cocok untuk pria, dan wanita yang mencoba mengambil pekerjaan pria pasti akan menemukan diri mereka keluar dari kedalaman mereka.
- d. Seorang wanita tidak dapat melakukan perjalanan dalam perjalanan yang berlangsung lebih dari satu hari dan malam kecuali dia ditemani oleh seorang Mahram (kerabat dekat laki-laki). Islam mengakui bahwa masyarakat bisa sangat berbahaya, dan begitu pula dengan melindungi wanita. Anggota parlemen tidak hanya menghadiri sidang harian tetapi juga harus melakukan perjalanan ke dalam dan luar negeri untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Tidaklah praktis bagi wanita Muslim untuk terus-menerus mencari Mahram. Semua ini tidak berarti untuk mengatakan

bahwa perempuan tidak memiliki suara dalam pemerintahan negara mereka. Jika seorang perempuan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi negara, ia dapat memberi nasihat kepada pemerintah tanpa harus ikut serta dalam pekerjaan sehari-hari.

Dapat dijelaskan bahwa karier alami dan utama wanita adalah rumah, keluarga, dan anak-anaknya, partisipasi penuh dalam proses parlementer melibatkan waktu berjam-jam dalam suasana pergaulan bebas dan interaksi sosial. Ini sangat dilarang dalam Islam, seorang wanita wajib mematuhi perintah Islam menghabiskan sepanjang hari dan malam di parlemen dengan mengenakan hijab itu sulit dan tidak nyaman, dan contoh praktis anggota parlemen perempuan di negara-negara Muslim saat ini adalah mereka tidak dapat mematuhi aturan. Sifat pekerjaan itu hanya cocok untuk pria. Di samping itu seorang wanita tidak dapat melakukan perjalanan dalam perjalanan yang berlangsung lebih dari satu hari dan malam kecuali dia ditemani oleh seorang Mahram (kerabat dekat laki-laki). Islam mengakui bahwa masyarakat bisa sangat berbahaya, dan begitu pula dengan melindungi wanita. Anggota parlemen tidak hanya menghadiri sidang harian tetapi juga harus melakukan perjalanan ke dalam dan luar negeri untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Tidaklah praktis bagi wanita Muslim untuk terus-menerus mencari Mahram. Semua ini tidak berarti untuk mengatakan bahwa perempuan tidak memiliki suara dalam pemerintahan negara mereka. Jika seorang perempuan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi negara, ia

dapat memberi nasihat kepada pemerintah tanpa harus ikut serta dalam pekerjaan sehari-hari.

